



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2022

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp/Fax. (0536) 3221716 email : biroorganisasi@kalteng.go.id
2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara garis besar, Laporan Kinerja memuat capaian kinerja, aspek sumberdaya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Sehingga sepanjang tahun 2022, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas atas pencapaian kinerja disesuaikan dengan visi, misi dan tugas fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja agar tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan baik. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 masih belum sempurna, baik dilihat dari penentuan indikator kinerja, penilaian pencapaian indikator kinerja dan keterbatasan lainnya.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja disusun, kami mengharapkan masukan, saran ataupun kritik yang dapat membangun peningkatan kinerja. Kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,

TTD

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja.

Sebagaimana bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja pemerintah menjadi aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi. Sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, teruji dan diandalkan. Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana.

Ringkasan capaian kinerja Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022 menunjukkan keberhasilan yang baik. Artinya telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya secara maksimal walaupun dengan kondisi anggaran yang terbatas.
2. Pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja yang baik.

3. Informasi mengenai kinerja Biro Organisasi yang disajikan dapat dijadikan bahan untuk perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja.
4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi telah mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guna penyempurnaan akan datang.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan tahun mendatang. Adapun melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat diketahui perkembangan dan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	4
1. Sumber Daya Manusia	4
2. Sumber Daya Keuangan	5
3. Sarana dan Prasarana	6
D. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja	9
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	9
2. Misi	10
3. Tujuan	10
4. Sasaran	10
5. Arah Kebijakan, Strategi dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Rencana Tindak Lanjut	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Penunjang.....	6
Tabel 2. 1 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021	12
Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Strategis Biro Organisasi	16
Tabel 3. 2 Skala Penilaian	17
Tabel 3. 3 Target Kinerja	18
Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	20
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan Rencana Strategis.....	21
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan RPJMD 2021-2026	22
Tabel 3. 8 Standar Efisiensi Anggaran.....	23
Tabel 3. 9 Analisis Efisiensi Keuangan	23
Tabel 3. 10 Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2021	26
Tabel 3. 11 Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2019	26
Tabel 3. 12 Tabel hasil penilaian PMPRB	27
Tabel 3. 13 Predikat Pemerintah Daerah Tahun 2021	30
Tabel 3. 14 Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020-2021	31
Tabel 3. 15 Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2020	32
Tabel 3. 16 Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2020	34
Tabel 3. 17 Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	35
Tabel 3. 18 Perbandingan Nilai IKM Pertahun.....	35
Tabel 3. 19 Pergub UPTD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	39
Tabel 3. 20 Rincian Program Biro Organisasi Tahun 2022	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase ASN Berdasarkan Golongan Biro Organisasi	4
Gambar 1.2 Persentase ASN Berdasarkan Golongan Biro Organisasi	4
Gambar 3. 1 Identifikasi Proses Bisnis	14
Gambar 3. 2 Peta Sub Proses Biro Organisasi.....	15
Gambar 3. 3 Diagram Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022.....	19
Gambar 3. 4 Diagram Capaian Kinerja Biro Organisasi Per Tahun.....	20
Gambar 3. 5 Model PMPRB dalam Program Reformasi Birokrasi.....	27
Gambar 3. 6 Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Pertahun.....	28
Gambar 3. 7 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pertahun	32
Gambar 3. 8 Nilai SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama 2022
Perjanjian Kinerja 2022
Rencana Aksi 2022
Rencana Kinerja Tahunan 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis dan dinamis mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas fungsi. Salah satu perubahan lingkungan strategis adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun prinsip yang mendasarnya, antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan. LKIP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat capaian kinerja tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKIP Biro Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bab I Pendahuluan berisi

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Sumber Daya Perangkat Daerah
- D. Isu Strategis

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
10. Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

B. Gambaran Umum

Biro Organisasi merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, dimana melaksanakan sebagian fungsi unsur staf Pemerintah Daerah bidang organisasi.

Maksud penyusunan LKIP Biro Organisasi Tahun 2022 menjadi sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas fungsi, serta diharapkan akan bermanfaat dalam mengambil keputusan dan masukan guna penyusunan rencana kerja tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah memberikan penjelasan mengenai:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis Biro Organisasi selama tahun 2022;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pelayanan administratif bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

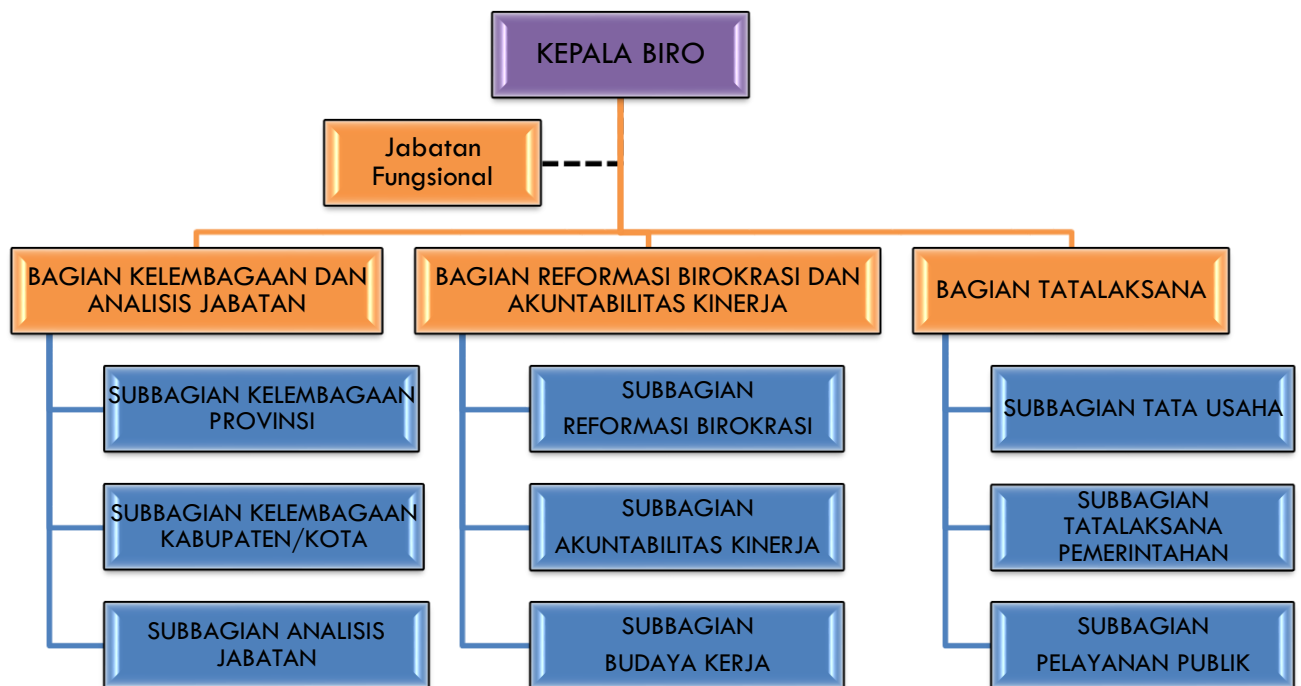
Memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, perlu melakukan perubahan struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pelaksanaan program Biro Organisasi mencakup berbagai aspek dengan tugas pokok menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tatalaksana, demi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 adalah:

1. Kepala Biro Organisasi;
2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yaitu:
 - a. Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Analisis Jabatan.
3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, yaitu:
 - a. Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Subbagian Budaya Kerja.
4. Bagian Tatalaksana terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - c. Subbagian Pelayanan Publik.

Bagan struktur organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Persentase ASN Berdasarkan Golongan Biro Organisasi



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

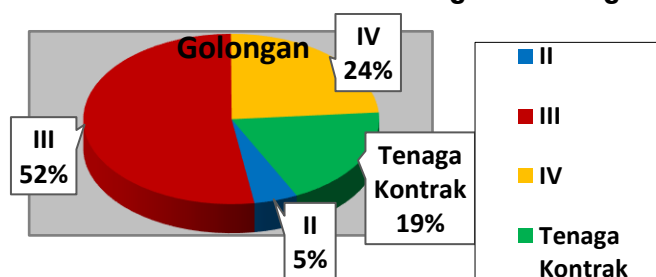
C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berjalannya organisasi Biro Organisasi ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya. Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kontrak sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Persentase ASN Berdasarkan Golongan Biro Organisasi



Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022

Adapun dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara sebanyak = 17 (tujuh belas) orang
- b. Menurut Golongan:
 - Golongan IV = 5 (lima) orang
 - Golongan III = 11 (sebelas) orang
 - Golongan II = 1 (satu) orang
- c. Menurut Jabatan:
 - Eselon II/b = 1 (satu) orang
 - Eselon III/a = 3 (tiga) orang
 - Eselon IV/a = 1 (satu) orang
- d. Menurut Pendidikan:
 - Sarjana S3 = 1 (satu) orang
 - Sarjana S2 = 5 (lima) orang
 - Sarjana S1 = 9 (sembilan) orang
 - SLTA = 2 (dua) orang
- e. Menurut Jenis Kelamin:
 - Laki-laki = 7 (tujuh) orang
 - Perempuan = 10 (sepuluh) orang
- f. Tenaga Kontrak sebanyak = 4 (empat) orang
 - Laki-laki = 1 (satu) orang
 - Perempuan = 3 (tiga) orang

2. Sumber Daya Keuangan

Guna menunjang pelaksanaan tugas fungsi, pada Biro Organisasi tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.361.829.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Daftar sarana prasarana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	KONDISI			
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	Lainnya
A.	Alat Angkutan Darat Bermotor					
1.	Mini Bus	2 Unit			Mencukupi	
2.	Sepeda Motor	12 Unit			Mencukupi	
B.	Alat Kantor					
1.	Mesin Tik Manual	3 Buah			Mencukupi	
2.	Filing Besi/Metal	7 Buah			Mencukupi	
3.	Lemari Kayu	3 Buah			Mencukupi	
C.	Alat Kantor Lainnya					
1.	Alat Penghancur Kertas	1 Buah			Mencukupi	
2.	Overhead Proyektor	1 Buah			Mencukupi	
D.	Meubelair					
1.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
E.	Alat Rumah Tangga Lainnya					
1.	Televisi	5 Buah			Mencukupi	
2.	Dispenser	1 Buah			Mencukupi	
F.	Peralatan Komputer					
1.	Komputer PC	17 Unit			Mencukupi	
2.	Lap Top	6 Unit			Mencukupi	
3.	Note Book	12 Unit			Mencukupi	
G.	Peralatan Komputer Mainframe					
1.	Hard Disk	5 Buah			Mencukupi	
H.	Peralatan Personal Komputer					
1.	Monitor	2 Buah			Mencukupi	
2.	Printer	22 Buah			Mencukupi	
3.	UPS	6 Buah			Mencukupi	
4.	Hard Disk Eksternal	5 Buah			Mencukupi	
I.	Peralatan Jaringan					
1.	Modem	1 Buah			Mencukupi	
J.	Meja Rapat Pejabat					
1.	Meja Tamu Ruang Biasa	1 Buah			Mencukupi	
K.	Lemari dan Arsip Pejabat					
1.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Buah			Mencukupi	
L.	Peralatan Studio Visual					
1.	Camera + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
2.	Proyektor + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
3.	Layar Proyektor	1 Buah			Mencukupi	
M.	Peralatan studio Video dan Film A	2 Buah			Mencukupi	
1.	Peralatan studio Video dan Film A Lain-lain	1 Buah			Mencukupi	
N.	Alat Komunikasi					
1.	Pesawat Telepon	2 Buah			Mencukupi	
2.	Mesin Fax	1 Buah			Mencukupi	
O.	Buku Perpustakaan					
1.	Buku Umum (Perundang-Undangan)	118 Buah			Mencukupi	
Q.	Lainnya					
1.	AC	9 Buah			Mencukupi	
2.	Kursi Tamu	5 Set			Mencukupi	
3.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
II.	Prasarana Penunjang					
1.	Kantor	1 Ruangan			Mencukupi	

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022

D. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Eksistensi Perangkat Daerah bergantung sejauh mana mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Isu strategis yang melingkupi Biro Organisasi antara lain:

1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi sasaran tolak ukur, 5 (lima) diantaranya menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu area perubahan Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Peningkatan Pelayanan Publik serta perubahan *Mind Set* dan *Culture Set*.

2. Meningkatkan Pengelolaan Penerapan SAKIP

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar penyelenggaraan pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat) semakin meningkat. Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu mengedepankan kepuasan masyarakat dan mengembangkan inovasi pelayanan. Berbagai payung hukum sudah diterbitkan agar optimalisasi terkait digitalisasi pelayanan publik bisa diimplementasi secara optimal. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem teknologi informasi terintegrasi dari level pemerintah pusat hingga daerah, maka kualitas layanan publik ikut terdongkrak. SPBE memutus mata rantai birokrasi yang selama ini mempunyai alur rumit menjadi terpadu. Sehingga menghasilkan keluaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun perlu diperhatikan membuat digitalisasi pelayanan pada organisasi pemerintah untuk tetap eksis. Keberhasilan sejumlah organisasi pemerintahan merupakan indikator dari kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Segala bentuk aktifitas penyelenggaraan pemerintahan bermuara pada pelayanan.

4. Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi. Selain itu terjalannya pola hubungan sinergitas dan mekanisme kerja yang jelas antar Perangkat Daerah juga menjadi cakupan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

Upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi semakin diperkuat dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan birokrasi pemerintah akan berdampak pada model struktur organisasi yang tidak lagi berbasiskan struktural. Namun berubah menjadi organisasi dengan 2 (dua) level yang dibangun secara fungsional. Harapannya, perubahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Termasuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis dan mudah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya. Penyederhanaan struktur Perangkat Daerah tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional. Konsep desain penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah disesuaikan dengan potensi kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja merupakan sasaran dan target kinerja. Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, bersifat jangka menengah, secara sistematis berkesinambungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Proses ini menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan. Melalui dokumen perencanaan selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maka ditetapkan visi Kepala Daerah.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Memajukan Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 sebagai berikut:

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,
Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

2. Misi

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka misi sebagai berikut:



Keterkaitan tugas fungsi Biro Organisasi pada misi 3, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Adapun rumusan tujuan Biro Organisasi dalam mensinergikan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah: *"Meningkatnya efektivitas tatakelola pemerintahan daerah"*

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai maupun dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang dicapai melalui tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran Biro Organisasi adalah *"Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi"*.

5. Arah Kebijakan, Strategi dan Program

Memperhatikan sasaran ditetapkan rumusan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik;
- b. Optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan standarisasi;
- c. Peningkatan pelayanan laporan kinerja Perangkat Daerah.

Adapun strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Mewujudkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang baik.

Mengacu pada sejumlah kebijakan maka dijabarkan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Biro Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Penataan Organisasi.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK 2021 Biro Organisasi dibuat untuk menyelesaikan aspek strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kinerja prioritas utama yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari Renstra dengan orientasi hasil. Mewujudkan sasaran jangka menengah telah ditetapkan sasaran strategis dan IKU Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, adapun perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penetapan Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					
1	2		4	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B (65)	B	BB	BB	A
	2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP)	Nilai	B	B (65)	BB	BB	A	A
	3.	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	85	87	88	90	92	94
	4.	Perkada Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1	1	1	1	1	1
			Pergub	5	5	5	5	5	5
	5.	Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	-	36	36	36	36	36
	6.	Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Prov/Kab/Kota	-	15	75	80	90	95
	7.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Sumber: PK 2022 Biro Organisasi, 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

pengukuran capaian kinerja dilakukan berkala secara triwulan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian. Biro Organisasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja. Memenuhi maksud tersebut, untuk menilai keberhasilan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

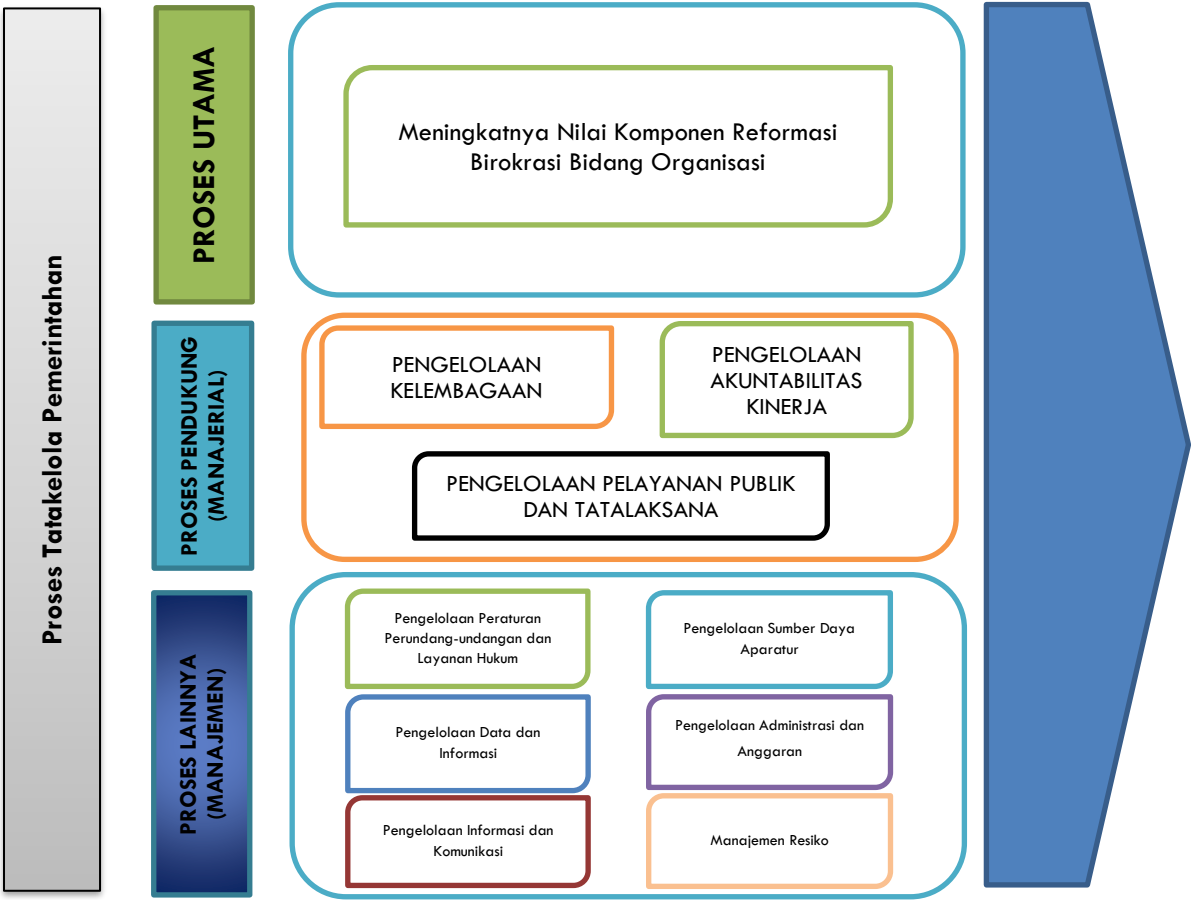
Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator sasaran strategis. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana menggunakan pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Menggambarkan hubungan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien Biro Organisasi dan dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusunlah proses bisnis visi, misi, tujuan dan sasaran. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, diperlukan pemetaan akar permasalahan yang melatarbelakangi. Sehingga dapat disusun program kegiatan yang harus dilaksanakan Biro Organisasi. Hasil pemetaan akar permasalahan disajikan dalam proses bisnis beserta *logframe* yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dapat dicermati pada Gambar 3.1 dan 3.2.

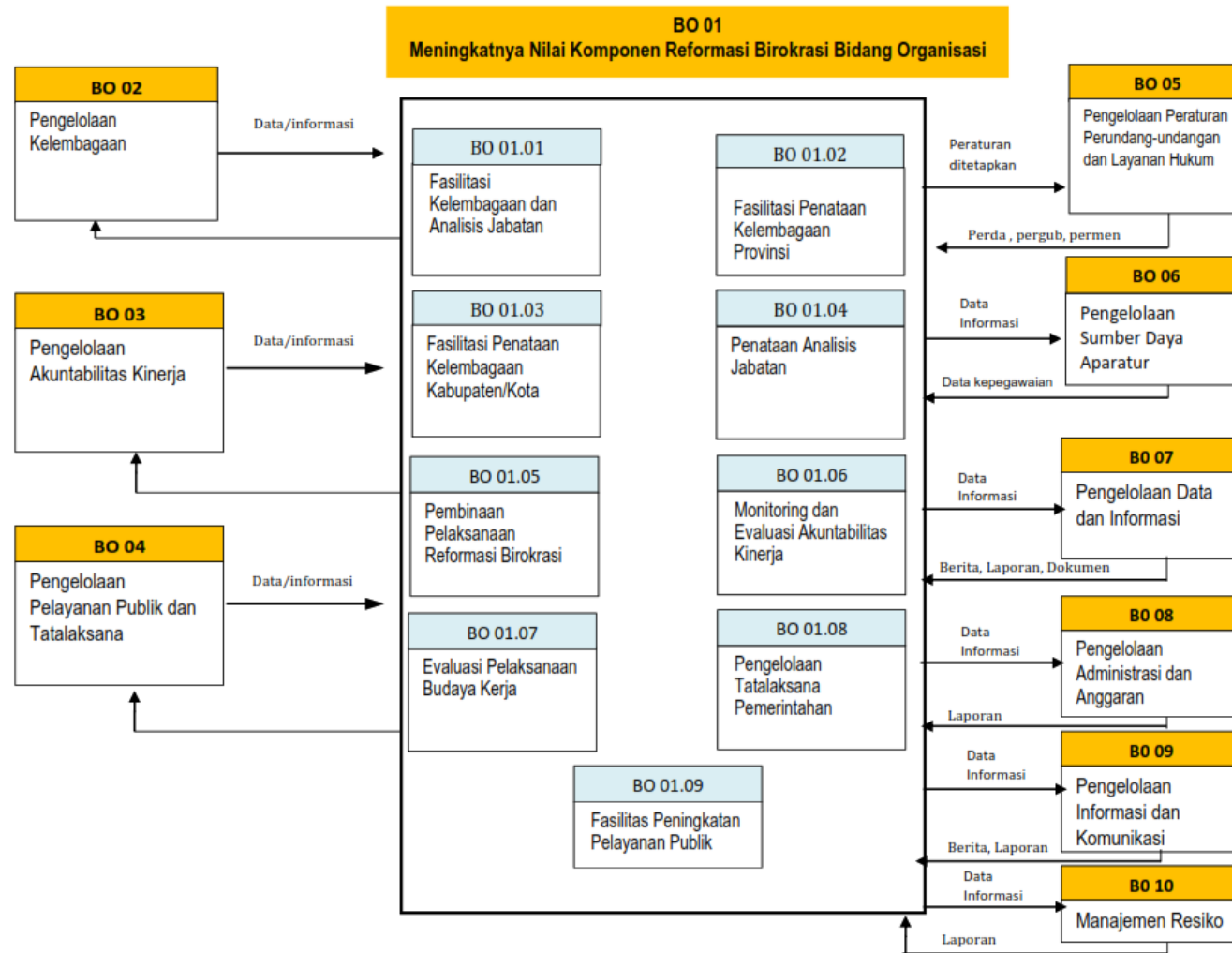
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja

Gambar 3. 1 Identifikasi Proses Bisnis



Gambar 3. 2
Peta Sub Proses Biro Organisasi



Usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat teralisasinya target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Strategis Biro Organisasi

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Level Perangkat Daerah.	Penerapan 8 (delapan) area perubahan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada level Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. • Komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan RB
2. Belum maksimalnya pengelolaan Laporan Kinerja PD	Koordinasi dalam pemahaman penyusunan Laporan Kinerja	Adanya komitmen untuk meningkatkan komponen pelaporan kinerja
3. Evaluasi pelayanan publik dan penerapan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya penyusunan proses bisnis PD; • Survey kepuasan masyarakat belum secara menyeluruh dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik; • Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik • Belum dilaksanakannya evaluasi terkait SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi anggaran dan sumber daya ASN tersedia • Ketentuan Perundangan/pedoman pelaksanaan yang berlaku • Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan baik dan berkualitas
4. Penerapan organisasi berbasis kinerja memerlukan penataan berkelanjutan, pada aspek etruktur, tugas, fungsi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja	Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur	Pergub tentang Anjab dan ABK telah tersusun
5. Penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi sesuai asas pembentukan Perangkat Daerah	Peraturan tentang Penataan kelembagaan yang terdapat perubahan	Perubahan dinamika kelembagaan organisasi

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, 2022

Adapun perhitungan pengukuran kinerja mencakup prosentase pencapaian rencana tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Perlunya ditetapkan cara pengukuran kinerja sebagai bukti bahwa keberhasilan pelaksanaan kinerja di Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Kalteng sudah akuntabel dan pembandingan bagi proses pengukuran kinerja untuk tahun berikutnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Terdapat 5 (lima) kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target kinerja maupun anggaran, sebagaimana tercantum skala penilaian pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Skala Penilaian

KRITERIA	CAPAIAN KINERJA	Warna
Sangat memuaskan	>90 - 100	
Memuaskan	>80 - 90	
Sangat Baik	>70 - 80	
Baik	>60 - 70	
Cukup (Memadai)	>50 - 60	
Kurang	>30 - 50	
Sangat Kurang	>0 - 30	

Sumber: PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 selanjutnya akan disajikan berupa analisis capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi kinerja menggunakan pembandingan beserta analisis capaian kinerja yang terdiri atas:

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Biro Organisasi, maka target kinerja yang ditetapkan dapat dicermati sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3	4
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1.	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	B (65)
	2.	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	87
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks	B (65)
	4.	Perda dan Pergub Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1
			Pergub	5
	5.	Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36
	6.	Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Prov/Kab /Kota	15
	7.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6

Sumber: Renstra 2021-2026, PK Biro Organisasi 2022

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel 3.4.

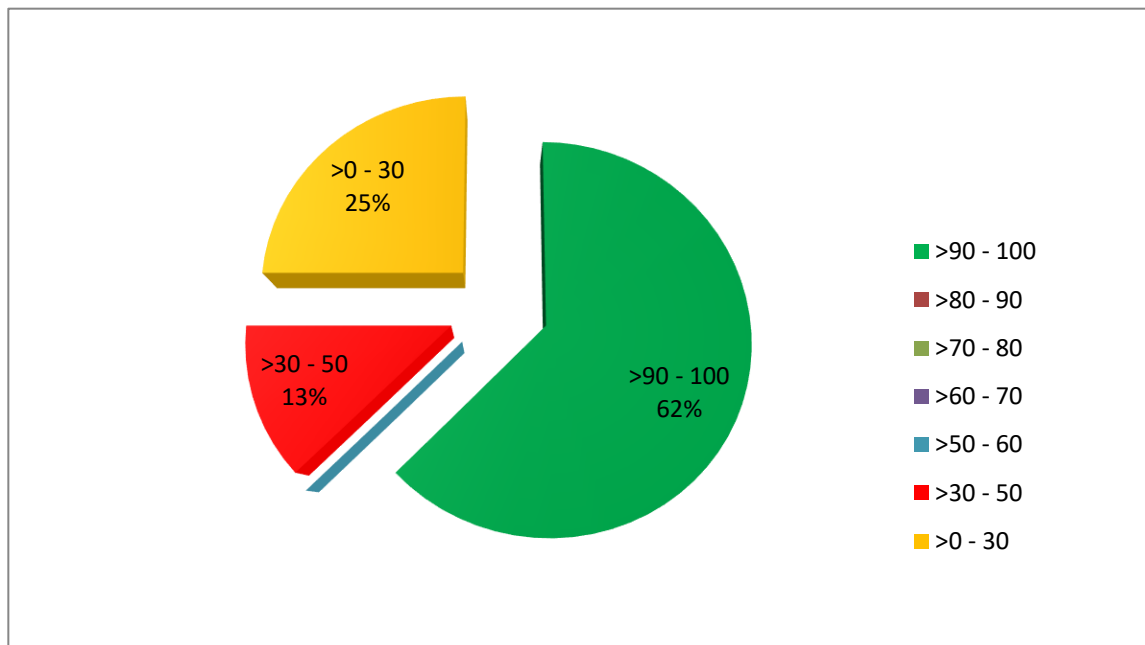
Tabel 3. 4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KET
1	2		3	4	5	6	7
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	B (65)	B	100	
	2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP)	Nilai	B (65)	B	100	
	3.	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	87	85,62	98,41	

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	SATUAN 3	TARGET 4	REALISASI 5	CAPAIAN % 6	KET 7
	4. Perkada Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1	-	-	
		Pergub	5	2	40	
	5. Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36	36	100	
	6. Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Prov/Kab /Kota	15	15	100	
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6	0	0	
TOTAL					538,41	
Nilai Capaian Kinerja					67,30	Predikat Baik

Sumber: Renstra 2021-2026, PK Biro Organisasi 2022

Gambar 3. 3
Diagram Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022



Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. 5 (lima) Indikator menunjukkan hasil sangat memuaskan;
2. 1 (satu) Indikator menunjukkan hasil kurang;
3. 2 (dua) Indikator menunjukkan hasil sangat kurang.

3. Pengukuran capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

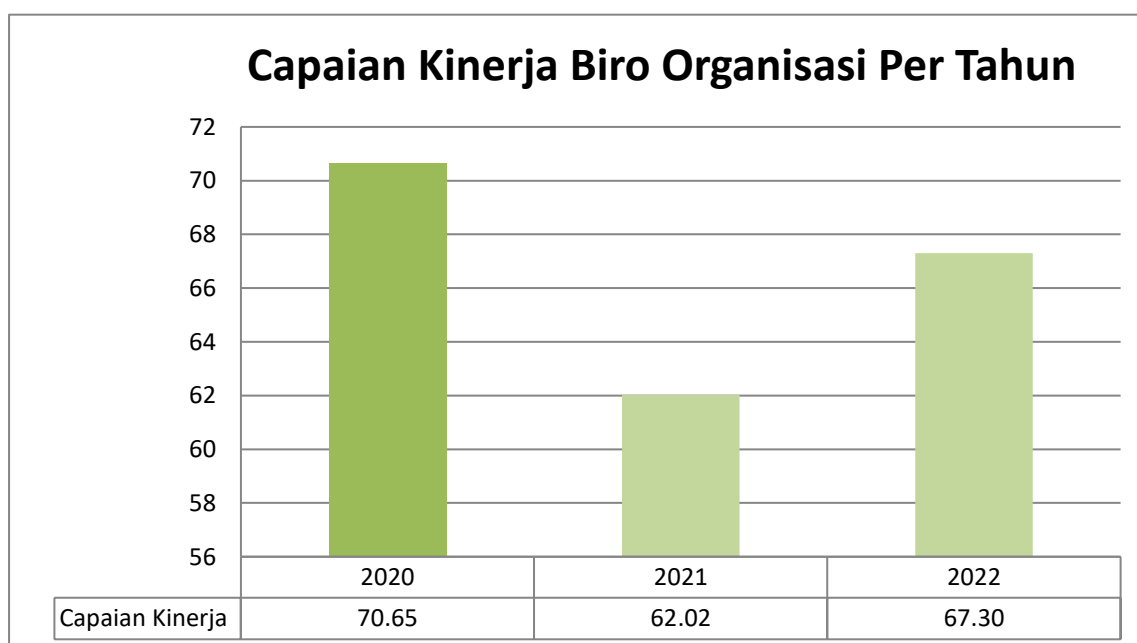
Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80	CC 59,21	74,01	80	CC 59,73	74,66	
2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks	86	83,02	96,53	85	82,79	97,40	
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	75	B 62,05	82,73	80	B 62,44	78,05	
4	Perda/Pergub Kelembagaan Organisasi Daerah	Perda/Pergub	1	0	0	1 Perda	0	0	
			90	349	100	5 Pergub	3	60,00	
			TOTAL		353,27	TOTAL		310,11	
			Nilai Capaian Kinerja		70,65 (Sangat Baik)	Nilai Capaian Kinerja		62,02 (Baik)	

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

Gambar 3. 4
Diagram Capaian Kinerja Biro Organisasi Per Tahun



Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

4. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam rencana strategis

Tabel 3. 6
Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan Rencana Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (Tahun)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Nilai Pelaksanaan RB	Nilai	80	80	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)
	Realisasi		CC 59,21	CC 59,73	B				
	Capaian		74,01	74,66	100				
	2. Nilai SAKIP	Indeks	BB	B	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)
	Realisasi		B 62,05	B 62,44	B				
	Capaian		82,73	100	100				
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	87	88	90	92	94	88
	Realisasi		83,02	82,79	85,26				
	Capaian		100	100	100				
	4. Perkada Kelembagaan PD	Perda/ Pergub	90	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub
	Realisasi		349	3 Pergub	2 Pergub				
	Capaian		100	60	40				
	5. Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36	36	36	36	36	36	36
	Realisasi		36	36	36				
	Capaian		100	100	100				
	6. Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Prov, Kab/Kota	15	15	75	80	85	90	95
	Realisasi		15	15	0				
	Capaian		100	100	0				
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Realisasi		-	1	0				
	Capaian		-	38,46	0				

Sumber: Renstra Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

5. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Tabel 3. 7
Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (Tahun)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	80	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)
	Realisasi		CC 59,21	CC 59,73	B				
	Capaian		74,01	74,66	100				
	2. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM)	Indeks	85	87	88	90	92	94	88
	Realisasi		83,02	82,79	85,26				
	Capaian		100	100	100				
	3. Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)
	Realisasi		B 62,05	B 62,44	B				
	Capaian		82,73	100	100				
	4. Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	Perda/ Pergub	90	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub
	Realisasi		349	3 Pergub	2 Pergub				
	Capaian		100	60	40				
Capaian Kinerja			89,19 (Memuaskan)	83,67 (Memuaskan)	85,00 (Memuaskan)				

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

Perumusan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja. Indikator Kinerja Biro Organisasi telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan progress kinerja yang telah dan akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya pendukung meliputi keuangan dan sumber daya manusia. Standar efisiensi anggaran disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8
Standar Efisiensi Anggaran

No	Prosentase Kinerja Pemerintah	Kinerja
1.	<60%	Sangat Efisien
2.	60%-80%	Efisien
3.	80%-90%	Cukup Efisien
4.	90%-100%	Kurang Efisien
5.	>100%	Tidak Efisien

Keuangan

Analisis efisiensi penggunaan keuangan untuk tahun anggaran 2022 disajikan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3. 9
Analisis Efisiensi Keuangan

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi Anggaran	Kategori
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Program Penataan Organisasi	1.217.457.000	1.181.820.221	97,07	2,93	Kurang Efisien
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.144.372.000	785.171.792	68,61	31,39	Efisien
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	-	2.361.829.000	1.966.992.013	83,28	16,72	Cukup Efisien

Efisiensi anggaran untuk program penataan organisasi sebesar 2,93% dari total anggaran sedangkan untuk program pendukung sebesar 31,39%. Pagu anggaran Biro Organisasi tahun 2021 adalah Rp 2.361.829.000,- dengan realisasi capaian Biro Organisasi sebesar Rp 1.966.992.013,- dengan persentase sebesar 83,28%. dengan efisiensi anggaran diperoleh nilai 16,72%.

Rumus perhitungan efisiensi anggaran :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Awal}} \times 100\% \right]$$

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran Biro Organisasi} = \left[\frac{1.966.992.013}{2.361.829.000} \times 100\% \right] = 83,28\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai bahwa anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah cukup efisien.

Sumber daya manusia

Jumlah pegawai pada Biro Organisasi dengan rincian PNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 4 (empat) orang. Melihat jumlah yang terbatas tersebut, Biro Organisasi harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja. Berkaitan dengan adanya tindak lanjut penyesuaian aturan baru dari Pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas fungsi masing-masing dan beban kerja yang bertambah.

7. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2022, tentunya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan baik dari faktor dalam maupun faktor luar Biro Organisasi. Kendala dan Permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan tenaga kontrak menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terlaksana dengan baik karena anggaran belanja pegawai tidak dapat dialihkan;
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Organisasi yang terbatas dan masih perlu peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidangnya sehingga belum dapat memberikan pelayanan maksimal;

Agar pencapaian kinerja sasaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal maka diupayakan strategi pemecahan masalah, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas aparatur yang kompeten dan bisa diandalkan di Biro Organisasi;
- b. Merancang penganggaran yang baik dalam menunjang program Biro Organisasi;

Keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan atau penurunan kinerja, terdapat beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan, yang dijelaskan di tiap indikator kinerja utama pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

IKU .1 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terjadi perubahan komponen penilaian hasil reformasi birokrasi mulai dari tahun 2020. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah 59,73 dengan kategori “CC” mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 59,21 dengan kategori “CC”.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2021

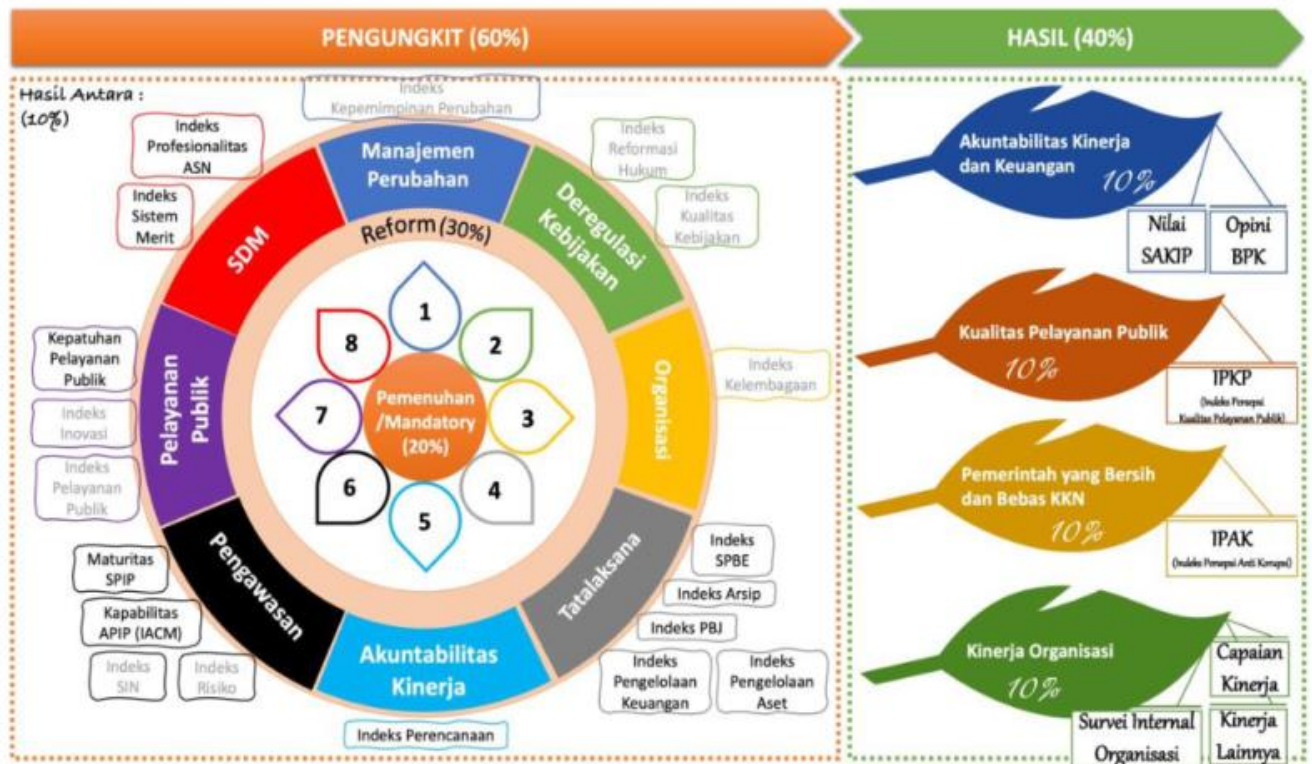
No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,83	12,87
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,73	5,53
	III. Reform	30,00	12,71	13,02
Total Komponen Pengungkit		60,00	30,27	31,42
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,41	7,34
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,68	8,37
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,42	7,81
4	Kinerja Organisasi	10,00	4,43	4,79
Total Komponen Hasil		40,00	28,94	28,31
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil		100,00	59,21	59,73

Tabel 3. 11
Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
I	Komponen Pengungkit					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,50	1,48	1,27	1,27
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,90	2,50	2,50
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,16	3,18	3,32	3,32
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,34	2,34	2,20	2,20
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,04	10,80	10,51	10,51
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,88	2,65	2,68	2,68
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,11	3,50	4,21	4,21
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,99	2,99	2,79	2,79
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	28,73	29,84	29,85	29,48
II	Komponen Hasil					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,50	8,59	8,59	8,80
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,44	4,80	3,61	3,69
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,81	5,49	5,90	6,14
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,33	7,98	8,33	8,48
Total Komponen Hasil (B)		40,00	28,08	29,86	29,43	30,11
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,0	56,80	59,70	59,28	59,59

Model PMPRB yang digunakan berdasarkan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model tersebut digambarkan sebagai berikut :

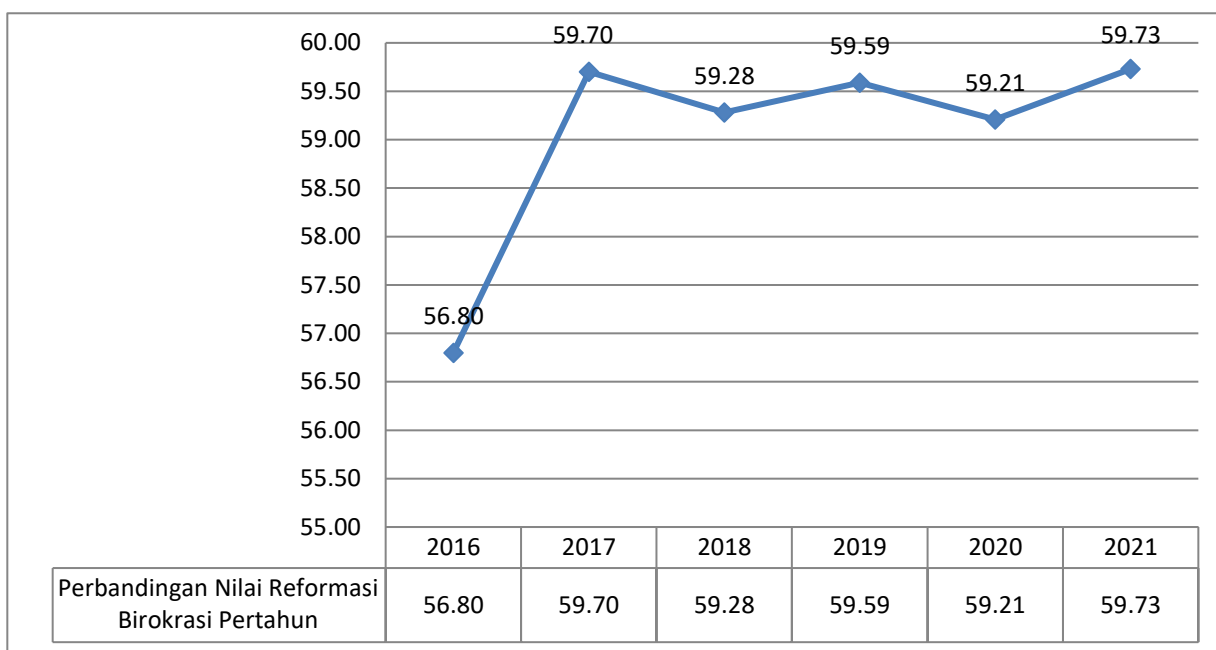
Gambar 3. 5
Model PMPRB dalam Program Reformasi Birokrasi



Tabel 3. 12
Tabel hasil penilaian PMPRB

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai		Sumber Data
			2020	2021	
1.	ASN Profesional	0-100	64	74,72	Badan Kepegawaian Nasional
2.	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	1	1	Kementerian PANRB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30	58,77	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,53	Kementerian PANRB
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	-	73,57	Ombudsman Republik Indonesia
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	42,35	32,72	Arsip Nasional Republik Indonesia

Gambar 3. 6
Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahunan



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terus melakukan peningkatan pemahaman reformasi birokrasi dari tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah, agar arah perubahan reformasi birokrasi dapat dipahami seluruh pegawai dan budaya kinerja semakin baik, melalui Pembinaan ke Kab/Kota dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pendampingan khusus terhadap Kabupaten / Kota yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
2. Telah dilaksanakannya pelatihan assesor melalui kegiatan workshop peningkatan kapasitas Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tanggal 11 April 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memaksimalkan peran agen perubahan yang telah ada dengan membuat rencana aksi secara menyeluruh serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana aksi yang telah disusun dan dilakukan. Terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang agen perubahan serta melakukan dialog antara agen perubahan dan pimpinan unit kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh inovasi yang telah dibangun oleh agen perubahan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat menjadi bagian dari penguatan system manajemen organisasi;

4. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan memanfaatkan hasil identifikasi (pemetaan) produk hukum yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menyusun peta keterkaitan antara kebijakan pusat dengan pemerintah daerah, sebagai alat untuk mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan di atasnya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi terkait efektivitas, serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan;
5. Sudah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus sudah dilaksanakannya pelantikan administrasi yang disetarakan menjadi pejabat fungsional berjumlah 402 jabatan;
6. Meningkatkan implementasi e-government melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terkait grand design penyelenggaraan e-government yang sudah dimiliki, melakukan penguatan integrasi sistem, dan mendorong pemanfaatan sistem informasi lebih maksimal, baik dilingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat (pengguna layanan), sehingga seluruh pegawai dan masyarakat (pengguna layanan) dapat memperoleh kemudahan pelayanan melalui Penerapan SPBE untuk media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR;
7. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM secara menyeluruh. Mulai dari menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi, pemanfaatan pohon kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, terus melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai, dan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP). Hasil dari hal-hal tersebut agar dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment, dan perbaikan manajemen SDM;
8. Menguatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses pembangunan Zona Integritas sebagai pendamping, fasilitator, dan evaluator bagi unit-unit kerja, sehingga akan meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas;
9. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal seperti pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat dalam menyusun inovasi pelayanan yang lebih baik, mendorong

penerapan kebijakan pemberian kompensasi layanan kepada penerima layanan, dan reward and punishment kepada pemberi layanan, serta melakukan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan

11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan reformasi birokrasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah agar komitmen dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota bisa semakin baik dan berkelanjutan;
12. Terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif, agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas.

Tabel 3. 13
Predikat Pemerintah Daerah Tahun 2021

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	No.	Pemerintah Daerah	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta	A	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	B
2.	Pemerintah Provinsi Bali	BB	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	B
3.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	BB	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	B
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	BB	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	B
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	BB	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	CC
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	BB			

Berdasarkan tabel diatas posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik di tingkat Nasional maupun di tingkat regional Kalimantan masih belum mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memperoleh predikat CC pada tahun 2021 dan posisi terakhir di tingkat regional Kalimantan. Hambatan yang dialami terkait kegagalan dalam mencapai target nilai B antara lain:

1. Data dukung yang tersedia masih kurang dan belum terupdate;
2. Zona Integritas masih dalam proses pengajuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi tersebut adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 3. 14
Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020-2021

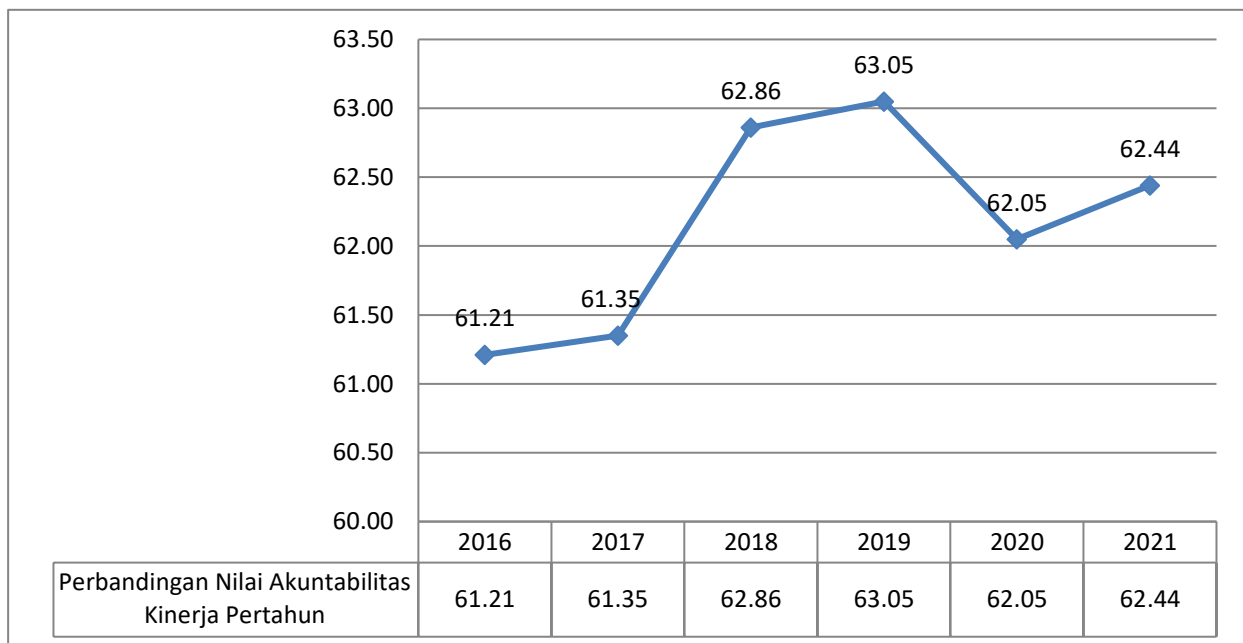
No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,94	21,02
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,30	14,45
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,44	10,49
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,88	5,90
e.	Capaian Kinerja	20	10,49	10,58
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,05	62,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 62,44 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 3. 15
Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	21,66	21,73	21,56	21,56	20,94
2	Pengukuran Kinerja	25	13,11	13,66	14,32	14,38	14,30
3	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,21	10,64	10,65	10,44
4	Evaluasi Kinerja	10	5,76	5,46	5,91	5,95	5,88
5	Capaian Kinerja	20	10,35	10,29	10,44	10,52	10,49
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,21	61,35	62,86	63,05	62,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B

Gambar 3. 7
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan MUSRENBANG RPJMD pada hari Kamis, 2 September 2021 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dibuka oleh Wakil Gubernur Bapak H. Edy Pratowo dan diikuti oleh Stakeholders terkait. Sebagai salah satu upaya mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

2. Dalam meningkatkan pemahaman SAKIP terutama di lini Pimpinan Perangkat Daerah agar tercipta kesamaan persepsi mengenai akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja secara komprehensif, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Kegiatan Pendampingan Reformasi Birokrasi, Sosialisasi Dan Pembangunan Zona Integritas Serta Pembinaan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang narasumber yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Bapak **Budi Prawira, S.E., M.M, beserta Tim** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Dalam memperbaiki penjabaran kinerja dari level Pemerintah Provinsi sampai ke level individu dengan berpedoman pada Kerangka Berpikir Logis (Logical Framework) maka telah disusun pembagian tugas atau skema perencanaan penyusunan Pohon kinerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
 - a. Di level Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan Pohon Kinerja dan Cascade adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Di Level Perangkat Daerah, Biro Organisasi mengarahkan dan mengkoordinir Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascade Perangkat Daerah;
 - c. Di Level Individu, Badan Kepegawaian Daerah berperan penting dalam mengarahkan SKP Individu lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pengintegrasian Sistem Perencanaan Kinerja dan Penganggaran serta membangun sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian reward dan punishment masih mengalami kendala yang sangat kompleks dalam segi anggaran, perencanaan dan stakeholder yang menangani aplikasi tersebut. Aplikasi yang digunakan sekarang banyak yang tumpang tindih dan terkesan mubazir apabila diimplementasikan tanpa ada arahan yang jelas.
5. Dalam meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja pada Perangkat Daerah yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran serta telah diberlakukan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan penyempurnaan kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai perlu untuk dibenahi kembali. Dalam hal tersebut, maka perancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah masih dalam proses tindak lanjut yang tertunda;

6. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja. Dalam memastikan anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, maka dalam hal tersebut diperlukan peranan aktif inspektorat dalam melakukan pengawasan.
7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas baik di internal maupun pada pemerintah provinsi sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan sakip yang efektif diperlukan pedoman evaluasi yang terencana dan terstruktur.
8. Meningkatkan komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong penguatan SAKIP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 16
Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2016-2020

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	No.	Pemerintah Daerah	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta	AA	7.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BB
2.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	8.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A	9.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	BB
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	B
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	B
6.	Pemerintah Provinsi Bali	BB			

Berdasarkan tabel diatas posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik di tingkat Nasional maupun di tingkat regional Kalimantan masih belum mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertahankan predikat B pada tahun 2021 dan menempati posisi terakhir di tingkat regional Kalimantan. Hambatan yang dialami terkait kegagalan dalam meningkatkan nilai antara lain:

1. Data dukung yang tersedia masih kurang dan belum terupdate;
2. Zona Integritas masih dalam proses pengajuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil atas survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tidak harus disajikan dalam bentuk angka. Tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal ini yang menjadi perhatian utama atas hasil survei terdapat saran perbaikan dan pemberi layanan.

Demi kelancaran perhitungan Capaian Sasaran Pembangunan dalam Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Kalimantan Tengah maka dipergunakan sistem perhitungan yang disajikan pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 17
Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Interval IKM	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
2.	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
4.	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB, No. KEP/25/M.PAN/2/2004

Metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung IKM Tengah adalah:

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total Interval Konversi PD}}{\text{PD yang mengadakan survei}}$$

Penyelenggara pelayanan publik yang telah melaksanakan survei harus melakukan penyusunan laporan survei. Laporan hasil survei dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkesinambungan.

Tabel 3. 18
Perbandingan Nilai IKM Tahun

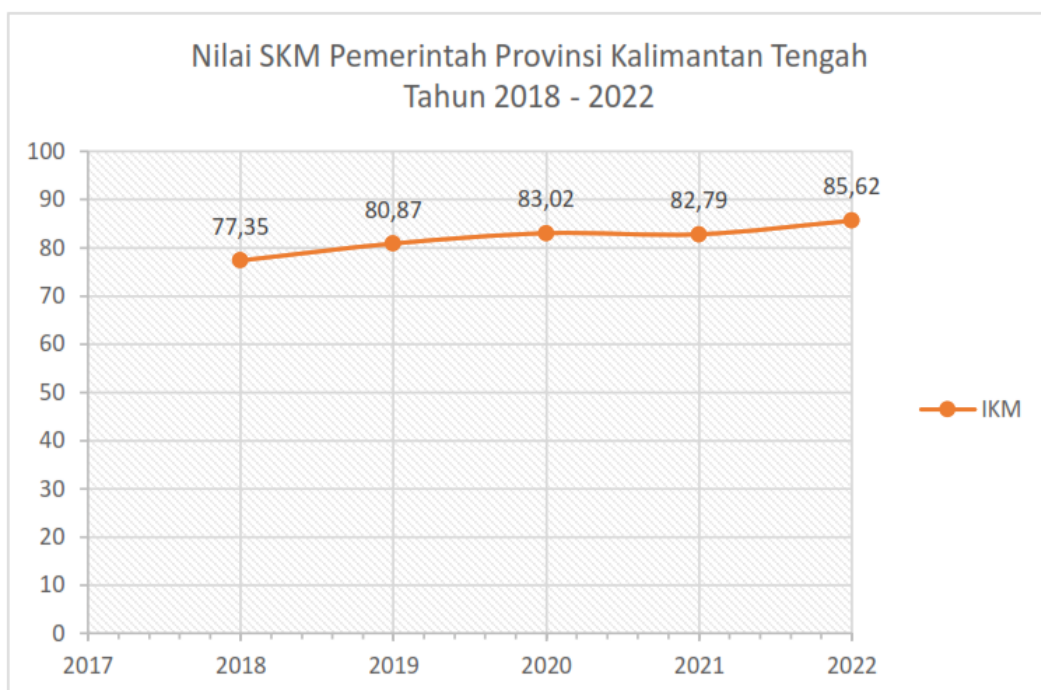
Target/Capaian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	77,23	80	82	84	86	88
Realisasi	-	74,33	76,93	80,06	83,02	85,26
Capaian	-	92,91	93,82	95,31	96,53	96,89

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalteng, 2022

Melihat penilaian dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah baik. Adapun permasalahan umum yang sering ditemui saat pelaksanaan survei sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mengisi survei;
2. Metode survei masih sederhana sehingga hasil yang diperoleh belum menggambarkan keseluruhan permasalahan;
3. Belum adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Pengaturan waktu survei yang terburu-buru sehingga tidak efisien.

Gambar 3. 8
Nilai SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan

kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Profil	Persepsi	Aspirasi
<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik pengguna layanan: Umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian terhadap kualitas pelayanan: sikap petugas, prosedur, waktu, fasilitas, biaya pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Keluhan, saran, dan harapan atas pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini telah dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan di Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada bulan April-September 2022, di beberapa lokasi unit pelayanan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (SAMSAT).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP).
3. RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah.

No	Perangkat Daerah Unit Layanan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Samsat Sekalimantan Tengah)	79,07	84,42	85	85,12	85,45
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP)	76,89	78,08	81,03	83,34	90,71
3	RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah	76,10	80,11	-	79,91	80,7
NRR IKM		77,35 (BAIK)	80,87 (BAIK)	83,02 (BAIK)	82,79 (BAIK)	85,62 (BAIK)

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses pengumpulan data dilakukan pada lokasi masing-masing unit pelayanan, data dan informasi disusun dengan mengkompilasi data yang telah dihimpun. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 3 (tiga) Perangkat Daerah telah menyampaikan laporan pelaksanaan SKM. Disampaikan juga beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) unit pelayanan yaitu RSUD dr. Doris Sylvanus pada Tahun 2020 yang belum dapat melakukan SKM pada tahun tersebut karena kondisi pandemi. Mengingat RSUD sebagai garda terdepan yang harus fokus dalam penanganan covid-19 maka pelaksanaan SKM oleh RSUD mundur dari jadwal rutin yang biasanya dilakukan;
2. Masih perlu pendampingan terkait penyusunan pelaporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
3. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,62. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2022.
4. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat dan terpenuhi.

Unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Melaksanakan kewenangan Provinsi di daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai pembentukannya memerlukan ijin yang berkekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang difasilitasi oleh Biro Organisasi dan selanjutnya dilimpahkan ke Biro Hukum sebagai proses akhir persetujuan. Berdasarkan data terakhir Peraturan Gubernur yang telah disahkan pada tahun 2022 disajikan pada tabel 3.19 ini.

Tabel 3. 19
Pergub UPTD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Peraturan	Tanggal ditetapkan
1.	Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	6 April 2022
2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Obat Tradisional Pada Dinas Kesehatan	28 Juni 2022

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2022, data primer

Realisasi Anggaran

Tabel 3. 20
Rincian Program Biro Organisasi Tahun 2022

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
	Program Administrasi Umum				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000	76.884.250	90,45	100,00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	9.978.000	99,78	100,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.000.000	154.432.800	94,74	100,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	24.920.000	99,68	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.648.000	169.901.350	98,98	100,00
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.879.000	98,79	100,00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.244.000	294.810.392	46,78	50,00
8	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	49.480.000	44.366.000	89,66	100,00
	Program Penataan Organisasi				
9	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	172.886.000	167.837.600	97,08	100,00
10	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	172.886.000	153.072.000	88,54	90,00
11	Penataan Analisis Jabatan	172.886.000	169.590.500	98,09	100,00
12	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	130.660.000	128.531.150	98,37	100,00
13	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	133.000.000	131.892.000	99,17	100,00
14	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	115.649.000	113.674.100	98,29	100,00
15	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	166.600.000	165.895.921	99,58	100,00
16	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	152.890.000	151.326.950	98,98	100,00
		2.361.829.000	1.966.992.013	83,28	86,00

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra, maupun analisis kinerjanya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori “baik”. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kerja keras semua komponen baik pimpinan, pejabat maupun pelaksana didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kinerja yang matang dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan kegiatan.

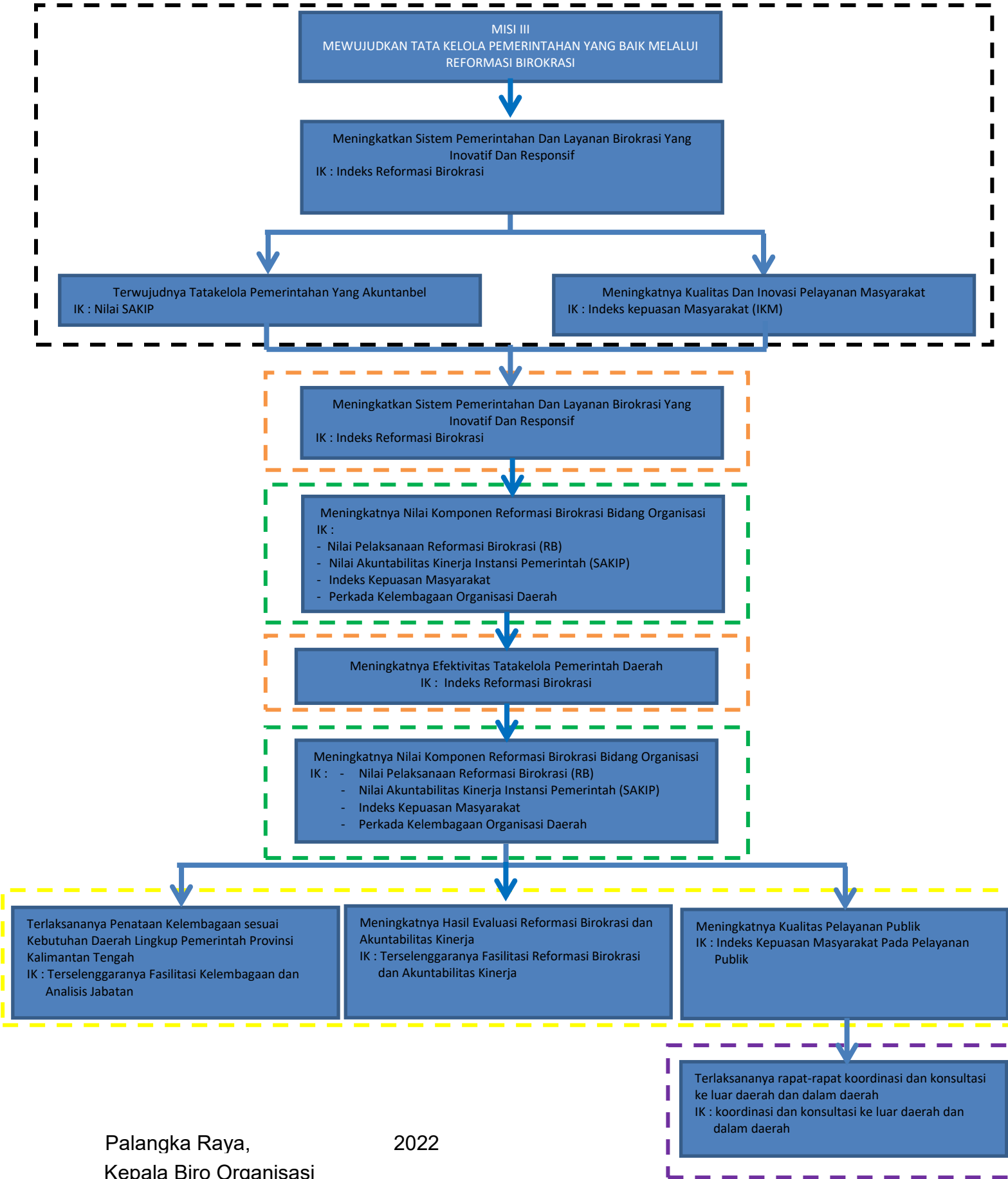
B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

1. Mengurangi 3 (tiga) indikator yang telah dianalisis tidak memenuhi kriteria SMART dan menambah 1 (satu) indikator.
2. Langkah pelaksanaan kegiatan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Pentingnya komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
4. Perlunya koordinasi dan bantuan pada kondisi keterbatasan sumber daya, yang dalam hal ini keterbatasan sumber data informasi. Sehingga Laporan Kinerja kedepannya, lebih akuntabel, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAMPIRAN

POHON KINERJA TAHUN 2022-2026



Palangka Raya,
Kepala Biro Organisasi
Setda Prov Kalteng

2022

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BETRI SUSILAWATI, S.Pi**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,
Pihak Pertama,

2022

BETRI SUSILAWATI, S.Pi
NIP. 197512252000012001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Penataan Kelembagaan sesuai Kebutuhan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tahun	1
2.	Tersedianya Informasi Jabatan dan Peta Jabatan, Data Rekapitulasi Forjab Struktural dan Fungsional serta Terwujudnya Pemeringkatan, Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jabatan	2.718
3.	Terlaksananya kegiatan FORSESDASI	Jumlah kegiatan FORSESDASI	Kali	3
4.	Tersedianya OPD yang tepat fungsi, tepat sasaran, tupoksi OPD, penataan kelembagaan dan UPTD sesuai kebutuhan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta terlaksananya Rakor Bidang Organisasi	Jumlah Perkada Kelembagaan yang sesuai Kebutuhan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Perkada	10
5.	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, Terbinanya Pejabat yang Telah Memahami Tata Kelembagaan OPD serta Terlaksananya Fasilitas Proses Penyusunan Perda OPD Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 518.658.000	
2. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 49.480.000	

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,
Pihak Pertama,

2022

BETRI SUSILAWATI, S.Pi
NIP. 197512252000012001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSIAS, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,
Pihak Pertama,

2022

YOSIAS, S.Hut, M.Si
NIP. 197506011999031002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tahun	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Kegiatan
1. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Anggaran
Rp. 379.309.000

Keterangan

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,
Pihak Pertama,

2022

YOSIAS, S.Hut, M.Si
NIP. 197506011999031002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATALAKSANA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,

2022

Pihak Pertama,

JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si
NIP. 196901051998031012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN TATALAKSANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik	%	87
2.				
3.				
4.				
5.				

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 319.490.000	
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 85.000.000	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 267.065.000	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 640.224.000	

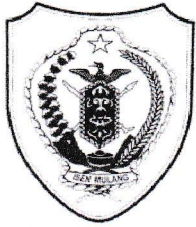
Pihak Kedua,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

Palangka Raya,
Pihak Pertama,

2022

JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si
NIP. 196901051998031012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASTRI ROSELIN S.P, S.Si., M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATALAKSANA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Palangka Raya,

2022

Pihak Pertama,

JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si
NIP. 196901051998031012

ASTRI ROSELIN S.P, S.Si., M.Si
NIP. 198804152011012001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan. RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kali	15
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	11
3.	Tersedianya Barang yang Digandakan	Jumlah Barang yang Digandakan	30.000	Lembar
4.	Tersusunnya Program dan Kegiatan yang Dituangkan dalam Dokumen Renja dan Penyusunan Laporan Biro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Biro	Dokumen	15
5.	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi KALTENG	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
6.	Terkelolanya Surat Menyurat	Jumlah Surat	Surat	1.000
7.	Terealisasinya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	Orang	30

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 171.648.000	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 163.000.000	
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 25.000.000	
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 85.000.000	
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 10.000.000	
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000	
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 630.244.000	

Pihak Kedua,

JANI DWIPRIAMBODO, ST., M.Si
NIP. 196901051998031012

Palangka Raya,

2022

Pihak Pertama,

ASTRI ROSELIN S.P, S.Si., M.Si
NIP. 198804152011012001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

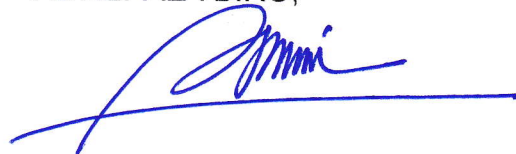
Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : BIRO ORGANISASI

Tugas dan Fungsi:

Membantu Asisten Administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Total Nilai Survei Yang Telah Dilaksanakan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Survei Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
		Perkada kelembagaan PD	Realisasi Perda dan Pergub Kelembagaan Organisasi Daerah yang telah sah	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Dokumen Anjab dan ABK	Realisasi Laporan Analisis Jabatan dan ABK	Biro Organisasi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Laporan Penerapan Budaya Kerja	Biro Organisasi Bagian Budaya Kerja
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025


Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile 0536-3221716 email: biroorganisasi@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI


Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B (65)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B (65)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87
		Perkada kelembagaan PD	Perda	1
			Pergub	5
		Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36
		Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Prov/Kab/Kota	15
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Administrasi Umum	Rp. 1.055.692.000	
2. Program Penataan Organisasi	Rp. 1.217.457.000	

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,


Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B (65)	-	-	-	B (65)	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B (65)	-	-	-	B (65)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	-	-	-	87	
		Perkada kelembagaan PD	Perda	1	-	-	-	1	
			Pergub	5	-	-	-	5	
		Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36	-	-	-	36	
		Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Persen	15	-	-	-	15	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6	-	-	-	2,6	

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Administrasi Umum		1.055.692.000	207.274.400	321.711.600	319.431.600	207.274.400	
2.	Program Penataan Organisasi		1.217.457.000	243.491.400	365.237.100	365.237.100	243.491.400	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		518.658.000	103.731.600	155.597.400	155.597.400	103.731.600	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		698.799.000	139.759.800	209.639.700	209.639.700	139.759.800	

Palangka Raya, Januari 2022
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B (65)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB (70)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Perkada kelembagaan PD	Perda	1
			Pergub	5
		Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	36
		Implementasi Penerapan Budaya Kerja	Persen	75
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,6

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIRO,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
NIP. 196604051985112001

